



# TECHNO

sejarah  
pemilu

pendidikan  
politik

pemilu &  
kader pm

AI

## PEMUDA SUDAH PAHAM PEMILU 2024 ?



**Edisi kedua**

# DAFTAR ISI

- Sapa Redaksi.....1
- Duh Pemuda Tak Banyak Tau Pemilu 24.....2&3
- Media Sosial Untuk Pemilu.....4&5
- Sejarah Pemilu.....6,7&8
- Kemenarikan Isu Pemilu Kunci Partisipasi Generasi Z.....9,10,11,&12
- Memotivasi Calon Wisudawan PPKAI.....13
- Hai Pemuda Jangan “Tidur”, Ayo Awasi Pemilu.....14&15
- Menggali Kreativitas Tanpa Batas: Peran Artificial Intelligence dalam Bidang Seni.....16&17
- Setengah Hati Memberi “Pendidikan Politik”.....18&19
- Fenomena Politisi Mendadak Agamis Jelang Pemilu: Perspektif Santri.....20
- PEMILU dan KADER PMII UNTUK 2024.....21
- Karya Sastra.....22
- Game.....23





## SAPA REDAKSI

Assalamualaikum

wr.

Wb

Alhamdullillah wasyukurillah kami panjatkan kepada gusti Allah Subhanahuwa ta’ala, Atas segala lumpuhkan rahmat dan hidayahnya. Sehingga kami dapat menyuguhkan Majalah Techno Edisi II kepada para pembaca.

Sholawat serta salam mari kita kumanangkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan dan rasa hormat kita kepada beliau.

Pada edisi kali ini, Tim Redaksi LPM Lensa Media mengangkat tema tentang “PAHAM-KAH PEMUDA TERHADAP PEMILU 2024?”. Harapan kami adanya majalah ini supaya pemuda di indonesia khususnya Kabupaten Jepara dapat memahami dan mengetahui

adanya pemilu pada tahun yang akan datang, serta pemuda dapat ikut serta kontribusi dalam pemilu tersebut. Sehingga cakrawala para pemuda mampu terbuka melihat jendela pengetahuan tanpa batas.

Cukup sekian, Semoga Majalah Techno edisi kali ini menjadi Majalah yang berpotensi dan memiliki peranan penting dalam upaya membentuk dan mewujudkan generasi pemuda yang paham tentang pemilu. Majalah ini tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahuwa ta’ala. Apabila ada kata-kata atau sehelai kata yang pahit, kami dari Tim Redaksi LPM Lensa Media Unisnu Jepara meminta maaf atas kata-kata tersebut.

Wassalamualaikum wr.wb

## TIM REDAKSI

pelindung:Dekan Fakultas Sains dan Teknologi | Pembina 1; Fifin Setya Prambudi | pembina 2: M.Zainal Abidin | Pimpinan Umum:Muh.Farhan sajid | Pimpinan Redaksi: Sri Wulandari | Sekretaris:Risalatul fitriyah | Bendahara:Dewi indah s | D.redaksi:Muh.raffi c., Robiatul adawiyah | D.digitalisasi:Lisna amanda | D.kepenulisan:Milfa latifah

# DUH, PEMUDA TAK BANYAK TAU PEMILU

**S**udah Pahamkah Pemuda terhadap Pemilu 2024? KPU secara resmi telah menerbitkan tahapan-tahapan Pemilu serentak pada 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam peraturan itu ditetapkan Pilpres dan Pileg dilaksanakan 14 Februari 2024.

Pemuda dan mahasiswa sebagai agen of change mempunyai artian bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam sebuah perubahan tanpa melihat lapisan masyarakat atau status ekonomi, perubahan yang dimaksud yaitu mahasiswa agen perubahan, penjaga nilai, penerus bangsa, kekuatan moral dan sosial kontrol.

Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda dan mahasiswa juga sebagai agen pembangunan yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah.

Pembangunan itu salah

satunya menyukseskan Pemilu 2024. Selain menggunakan hak pilih dan mengawasi jalannya Pemilu, pemuda dan mahasiswa juga berperan sebagai motor penggerak masyarakat untuk jadi pemilih dan pengawas yang cerdas.

Hasil poling sederhana Bagian Litbang Lembaga Pres Mahasiswa (LPM) Lensa Media Fak. Saintek Unisnu Jepara belum menunjukkan peran pemuda dan mahasiswa secara signifikan dalam pemilu.

Dalam poling itu sekitar 90 persen diikuti pemuda dan mahasiswa. Rentan usia 20 sampai dengan 45 tahun. Sementara sisanya diisi oleh orang tua dengan rentan usia antara 46 sampai 50 tahun. Penyebaran poling secara acak. Poling dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu (11/1)-Jumat (13/1).

Hasil poling sederhana Bagian Litbang Lembaga Pres Mahasiswa (LPM) Lensa Media Fak. Saintek Unisnu Jepara belum menunjukkan peran pemuda dan mahasiswa secara signifikan dalam pemilu.

Dalam poling itu sekitar

90 persen diikuti pemuda dan mahasiswa. Rentan usia 20 sampai dengan 45 tahun. Sementara sisanya diisi oleh orang tua dengan rentan usia antara 46 sampai 50 tahun. Penyebaran poling secara acak. Poling dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu (11/1)-Jumat (13/1).

Hasil poling menunjukkan 90,4 persen tahun tentang pemilu 2024 dan 9,6 persen tidak tahu. Walaupun peserta poling mengungkapkan tahu Pemilu 2024, tetapi tidak sinkron dengan hasil pertanyaan selanjutnya. Yang mengungkapkan jika tahu Pemilu serentak dilaksanakan 2024 sebanyak 54,3 persen. Dan 45,7 persen tidak tahu.

Jumlah parpol yang telah diumumkan KPU ternyata tidak banyak diketahui. Hanya 42,6 persen yang jawab tahu. Sisanya 57,,4 persen tak tahu.

Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 14 Februari menunjukkan 54,3 persen audiens tahu Pilpres dilaksanakan 14 Februari 2024. Dan 45,7 Persen audiens mengungkapkan hal sebaliknya.

Sementara yang tahu pelaksanakan Pileg 14 Februari

hanya 48,9 persen dan sisanya atau 51,1 persen tidak tahu.

Walaupun bakal calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan, 39,4 persen mengungkapkan sudah menentukan hak pilihnya. Sementara 60,6 persen belum menentukan hak pilihnya. Hal serupa diungkapkan pengisi kuisioner jika 22,3 persen sudah menentukan pilihan calon legislative. 77,7 persen belum.

Hal menggembirakan dalam poling itu peserta poling 98,9 persen akan menyalurkan hak pilihnya. 1,1 persen tidak ikut.

Dengan demikian LPM Lensa Media mengadakan Seminar Nasional Bertanjuk tema “Sudah pahamkah pemuda terhadap pemilu?” Pada 31 januari 2023. Harapannya para pemuda khususnya lokal jepara paham tentang pemilu. Untuk informasi mengenai kepemiluan bisa kunjungi media resmi KPU.



# Pemanfaatan Media Sosial terhadap Pemilu dan Politik Indonesia

Para politisi Indonesia perlu sekali mengambil manfaat penggunaan media sosial terhadap pemilu yang akan dilaksanakan. Ketika zaman digital semakin maju, maka pemanfaatan media sosial juga menjadi salah satu kecenderungan yang penting untuk semua orang. Hal ini menjadi kabar baik untuk para anggota dewan agar lebih luas dalam memperkenalkan diri kepada khalayak ramai.

## Manfaat Medsos di Dunia Politik

Beberapa manfaat medsos yang bisa dioptimalkan para caleg atau politisi adalah sebagai berikut.

### 1. Wadah Pendapat Masyarakat

Media sosial adalah sebuah aplikasi yang kini digandrungi masyarakat Indonesia. Selain sebagai bentuk eksistensi diri, media sosial merupakan ranah yang sangat mudah untuk mendapatkan beragam informasi. Politisi sangat bisa menggunakan media sosial untuk mendengar pendapat rakyat, beserta segala permasalahannya.

Dengan demikian, para petinggi tersebut bisa mencari sebuah solusi yang menguntungkan semua pihak. Langkah ini membuat manfaat penggunaan media sosial terhadap pemilu juga bisa dirasakan secara maksimal. Medsos benar-benar dapat difungsikan sebagai senjata untuk menarik simpati masyarakat



Sumber: Freepik.com



Sumber: Freepik.com

### 2. Menggiring Opini Publik

Hampir seluruh kalangan menggunakan media sosial untuk berinteraksi secara virtual. Tak mengherankan bila medsos juga menjadi semacam koran berjalan yang berisi segala macam informasi dari berbagai belahan dunia. Media sosial bisa menghadirkan berita yang mampu menggiring opini publik terhadap suatu masalah tertentu.

Meski sebagai pembaca harus lebih bijak saat mengikuti berita yang beredar, agaknya hal ini tetap menjadi satu keunggulan media sosial yang tidak bisa dihindari. Beragam isu politik yang diberitakan bahkan bisa menjadi boomerang untuk politisi bila tak bisa menanganinya dengan bijak.

### 3. Jembatan Kedekatan dengan Masyarakat

Manfaat penggunaan media sosial terhadap pemilu dan dunia perpolitikan selanjutnya yakni menjadi jembatan keakraban dengan masyarakat. Karena akses media sosial hanya berbekal email saja, maka semua orang pun bisa memiliki media sosial untuk pribadi maupun kelompok. Fakta ini membuat jeda antara satu orang dengan lainnya menjadi sangat tipis.

Ketika seorang anggota dewan bisa memaksimalkan media sosialnya dengan baik, maka hal ini bisa memicu kekerabatan yang lebih baik dengan masyarakat. Saat petinggi sudah mau menunduk untuk mendengarkan, maka masyarakat tidak akan sungkan menyampaikan aspirasinya. Hal inilah yang menjadi tujuan akhir dari sistem kampanye politik, agar banyak orang yang bisa menyalurkan semua pendapatnya secara leluasa.



Sumber: Freepik.com



Sumber: Freepik.com

#### 4. Membangun Citra Diri

Ingin dikenal sebagai sosok seperti apakah Anda di media sosial? Bagaimana cara menyajikan citra itu kepada masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi acuan Anda ketika memutuskan sebuah citra atau branding diri kepada publik. Medsos adalah tempat yang sangat baik untuk memulai menampakkan citra tersebut agar orang-orang mulai menaikkan awareness pada diri Anda.



Sumber: Freepik.com

#### 5. Upaya membangun branding

Tak bisa instan, branding adalah sesuatu hal yang cukup melekat pada diri Anda. Jika ingin membangun branding untuk sebuah pemilu dan perpolitikan, Anda dapat memulai minimal satu tahun sebelum proses pemilihan umum dilangsungkan. Anda dapat menjabarkan diri Anda di media sosial sebagaimana Anda ingin dikenal.



Sumber: Freepik.com

#### 7. Menjelaskan ciri khas dan spesialisasi politisi

Hampir semua orang memiliki ciri khas masing-masing. Anda bisa menggali hal itu kemudian menjadikannya sebagai peluru baru untuk menaikkan kekuatan Anda. Sebuah ciri adalah pembeda yang bisa membuat orang lain langsung mengingat Anda sebagai pribadi. Misalkan slogan tertentu, atau kebiasaan tertentu. Dengan mengedepankan manfaat penggunaan media sosial terhadap pemilu, diharapkan langkah ini akan lebih efektif.



Sumber: Freepik.com



Sumber: Freepik.com

#### 8. Sarana Komunikasi Publik

Media sosial adalah aplikasi yang mengedepankan engagement atau interaksi antara pemilik akun dengan orang-orang yang memberikan respons. Baik berupa like atau komentar, sebuah jalinan interaksi di media sosial adalah hal penting yang harus terus diupayakan. Semakin baik engagement, maka peluang Anda mendapatkan perhatian masyarakat juga akan semakin besar.

Ketika sebuah akun sudah memiliki engagement yang baik, maka hal ini akan memudahkan Anda dalam menjalin komunikasi publik yang berisi tentang dunia politik. Branding yang telah dilakukan sebelumnya akan lebih mudah menyentuh hati masyarakat karena kepercayaan mereka sudah terbangun.

# SEJARAH

**S**ejarah Pemilu di Indonesia Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam tiga era pemerintahan yaitu Masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Awalnya, pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara serta pemerintah dan rakyat yang fokus mempertahankan kemerdekaan. Kemudian Pemilu pertama kali baru bisa dilaksanakan pada 1955 dan terus berlangsung hingga saat ini. Berikut penjelasan singkat tentang pelaksanaan pemilihan umum dari masa ke masa.

## 1. Pemilu 1955

Pada tahun 1955, diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional pertama di Indonesia. Sesuai dengan UU No.7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali. Pemilu pertama diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Pemilu kedua diadakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus kelompok dan calon perseorangan. Muncul pandangan bahwa Pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis dan transparan dalam sejarah Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil pemilu digantikan oleh DPR-GR. Selain itu, kabinet yang ada diganti dengan Kabinet Gotong Royong, dan Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat menjadi pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Sistem yang diterapkan dalam Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional tertutup atau

perwakilan berimbang. Dalam sistem ini, kursi yang tersedia didistribusikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan perolehan suara yang mereka dapatkan. Dalam sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk.

## 2. Pemilu 1971

Setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai Presiden melalui hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS NO. XLIV/MPRS/1968). Pada Pemilu 1971, rezim Orde Baru mulai mengurangi persaingan politik dan menekan pluralisme politik. Terkait dengan pembagian kursi, metode pembagian yang digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pada periode tersebut, mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, di mana semua kursi didistribusikan secara penuh di setiap daerah pemilihan. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 organisasi massa, yaitu NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi, PSII (Partai Sosialis Islam Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI (Ikatan

# I PEMILU

Pendukung Kemerdekaan Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), dan Golkar. Hasilnya, Golkar sebagai partai mayoritas meraih 62,82% suara, diikuti oleh NU, PNI, dan Parmusi.

## 3. Pemilu 1977

Pemilu berikutnya pada tahun 1977 mendai dimulainya praktik pemilihan umum secara teratur setiap lima tahun. Pemilu 1977 diadakan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pemilu 1977 ini juga terjadi penyederhanaan atau penggabungan partai politik, di mana sepuluh partai politik digabung menjadi tiga. Ketiga partai tersebut ialah PPP, PDI, dan Golkar yang terus berpartisipasi dalam pemilu hingga tahun 1997. Golkar kemudian tetap menjadi partai mayoritas dalam pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sejak Pemilu 1977, jumlah peserta pemilu menjadi lebih sedikit yaitu hanya tiga partai politik.

Selain itu, hasil pemilu juga selalu sama, di mana Golkar selalu menjadi pemenang, sementara PPP dan PDI berperan sebagai pelengkap atau sekadar ornamen. Bahkan, Golkar telah menjadi pemenang sejak tahun 1971.

## 4. Pemilu 1982-1997

Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 masih sama yaitu Golkar, PPP dan PDI. Selama periode pemilu tersebut, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Dalam Sidang Umum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden dan menjabat selama 32 tahun. Namun, Wakil Presiden berganti setiap periode sesuai dengan hasil Sidang

Umum

MPR.

## 5. Pemilu 1999

Akibat tergulungnya pemerintahan Presiden Soeharto, pemilu dijadwalkan lebih awal dan dilaksanakan pada tahun 1999. Padahal seharusnya pemilu berikutnya diadakan pada tahun 2002. Dengan waktu persiapan yang terbatas, pemilu 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu tersebut berjalan secara damai tanpa adanya kekacauan. Cara pembagian kursi dalam pemilihan kali ini masih menggunakan sistem proporsional tertutup dengan varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suaranya di daerah pemilihan dengan proporsi yang seimbang. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kali ini, peringkat perolehan suara partai di daerah pemilihan digunakan untuk menentukan calon terpilih. Jika pada pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih jika partai tersebut meraih kursi, sekarang calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang mencalonkan diri. Sistem proporsional tertutup dalam pemilu sendiri telah diterapkan sejak pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. Karena rakyat tidak dapat memilih langsung wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif, sistem proporsional tertutup ini dianggap kurang demokratis. Selanjutnya, berdasarkan hasil Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz dalam Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli 2001.

## 6. Pemilu 2004



Setelah pemilu tahun 1999, pembuat undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem pemilu proporsional daftar tertutup (closed list) menjadi sistem proporsional terbuka agar pemilih dapat mencoblos langsung calon legislatif pilihan mereka di surat suara. Surat suara tidak hanya mencantumkan nomor urut dan simbol partai, tetapi juga nomor urut dan nama calon yang didukung oleh partai. Namun, pada pemilu tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem tersebut masih diterapkan dalam bentuk sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup (relatively closed open list system). Dalam sistem ini, calon legislatif akan menduduki kursi berdasarkan perolehan suara partai asalkan mencapai kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih (BPP). Sistem proporsional terbuka diterapkan dalam pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Terdapat dua jenis pemilihan umum dalam Pemilu 2004. Pertama, pemilihan anggota parlemen yang partai politiknya memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat setelah terjadi perubahan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu tahun 2004 menunjukkan beberapa perbedaan dalam sistem pemilihan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, terutama dalam sistem pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak melalui anggota MPR seperti pada pemilu sebelumnya. Itulah mengapa Pemilu tahun 2004 disebut sebagai kemajuan dalam demokrasi Indonesia.

## 7. Pemilu 2009

Pada tahun 2009, diadakan pemilihan umum yang merupakan pemilihan umum kedua yang melibatkan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, diajukan bahwa pasangan calon yang terpilih harus memperoleh lebih dari 50% dari total suara dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada tanggal 9 April 2009. Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai Presiden dengan Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009-2014.

## 8. Pemilu 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu untuk memilih calon legislatif dan calon presiden dan calon wakil presiden. Pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemilihan anggota legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019. Sedangkan, pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

## 10. Pemilu 2019

Pemilu 2019 digelar serentak dengan pemilihan presiden pada 17 April. Pemilu ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Dari partai-partai tersebut, terdapat 9 partai yang berhasil memperoleh kursi di Senayan, yaitu PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, tujuh partai lainnya meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Hasil pemilu tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2019 - 2024.



Sumber: Tempo.co



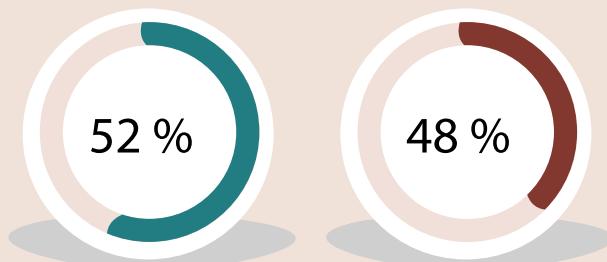
# Kemenarikan Isu Pemilu Kunci Partisipasi Generasi Z



Oleh :  
Muhammadun  
(Anggota KPU Kabupaten Jepara. Web: [www.korespondensi.id](http://www.korespondensi.id))



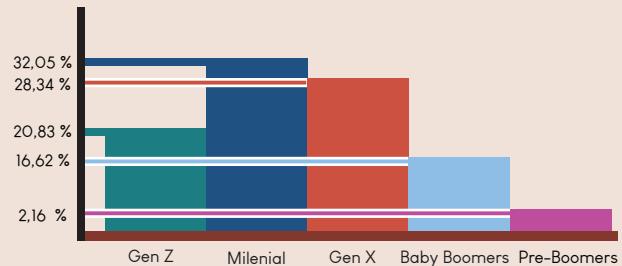
Pemilih muda yang masuk dalam kelompok Generasi Z (kelahiran 1997-2007), atau kalau pada 2024 usianya maksimal 27 tahun, sering menjadi bahan perbincangan menjelang pemilu, termasuk Pemilu 2024. Mereka sering dianggap sebagai generasi yang akan banyak mewarnai dan menentukan masa depan. Di sisi lain, seberapa tingkat partisipasi mereka dalam pemilu mengisi banyak ruang diskusi kepemiluan.



● Pemilih usia muda

● Pemilih usia diatas 40 tahun

KPU RI telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 pada 2 Juli 2023 lalu, yakni 204.807.222 pemilih. Dari jumlah ini, sebanyak 52 persen (106.358.447 pemilih) merupakan pemilih muda. Selebihnya, 48,07 persen merupakan pemilih yang usianya di atas 40 tahun. Untuk usia muda, yakni 17-30 tahun sebanyak 31,23 persen atau 63,9 juta pemilih, dan usia 31-40 tahun ada 42,395 juta pemilih (20,70 persen).

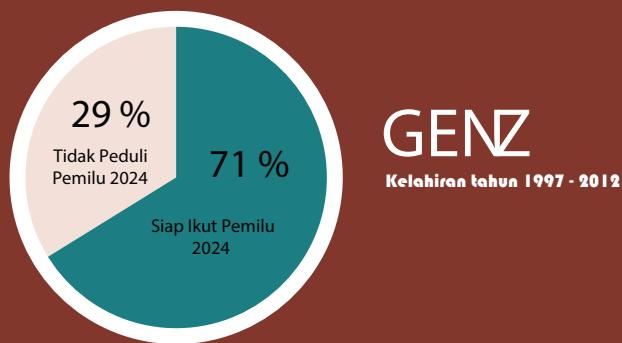


Di Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan jumlah DPT di provinsi dengan 35 kabupaten/kota ini sebanyak 28.289.413 pemilih. Dari jumlah ini, Generasi Z (kelahiran 1997-2007) sebanyak 5.891.384 pemilih (20,83 persen), Generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 9.065.832 pemilih (32,05 persen), Generasi X (1965-1980) sebanyak 8.017.620 pemilih (28,34 persen). Selebihnya adalah pemilih Generasi Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 4.702.658 pemilih (16,62 persen), dan Generasi Pre-Boomer (kelahiran sebelum 1945) sebanyak 611.919 (2,16 persen).

Sedangkan di Kabupaten Jepara, KPU Jepara menetapkan DPT pada 20 Juni 2023, yaitu sebanyak 914.996 pemilih, terdiri atas 457.357 pemilih laki-laki dan 457.639 pemilih perempuan. Dari keseluruhan jumlah DPT di Jepara itu, sebanyak 109.854 (12,01 persen) usianya 17-22 tahun. Sedangkan yang usianya 23-30 tahun ada 157.396 pemilih (17,20 persen). Dari jumlah ini, terlihat betapa signifikan posisi Generasi Z dalam Pemilu 2024. Jika ditambah pemilih usia muda kategori pemilih milenial, maka jumlahnya akan lebih signifikan lagi karena pemilih dengan usia 31-40 tahun adalah 187.751 pemilih (20,53 persen).

Pada 27 Januari 2022 – 7 Maret 2022, IDN Research melakukan jajak pendapat terhadap 1.000 sampel yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Hasilnya, sebanyak 77,7 persen Generasi Z beranggapan sistem politik di Indonesia membaik dan akan membawa bangsa ini maju. Sementara itu 61 persen beranggapan Indonesia dalam situasi tidak baik, namun mereka optimistis kondisi bangsa ini bakal membaik. Sedangkan 28 persen menganggap situasi Indonesia baik dan akan makin lebih baik. Hanya 10 persen beraanggapan Indonesia baik, namun suasannya akan memburuk.

Ada tujuh alasan yang menjadi pengguncit optimisme Generasi Z, yaitu kemanjukan (78 persen), persatuan Indonesia (75 persen), demokrasi (75 persen), keamanan (74 persen), kondisi ekonomi (70 persen), penegakan hukum (67 persen), dan pemberantasan korupsi (65 persen).



Jajak pendapat tersebut juga menyajikan data sikap Generasi Z terhadap Pemilu 2024. Terhadap isu ini, ada 29 persen yang menyatakan tak peduli terhadap Pemilu 2024. Namun sebanyak 71 persen menyatakan siap ikut Pemilu 2024. Angka 71 persen ini masih di bawah angkat partisipasi pemilih (yang menggunakan hak pilih) pada Pemilu 2019 yang secara nasional lebih dari 81 persen.



Ilustrasi Gen Z : Adobe Firefly

Studi ini juga mengungkap data bagaimana kecenderungan Generasi Z dalam mengonsumsi informasi digital yang berbau politik. Mereka yang berusia 17-24 tahun mengakses berita politik satu sampai tiga kali dalam sepekan. Sedangkan yang usia 24-35 tahun lebih jarang lagi, yakni satu sampai tiga kali dalam sebulan.

Studi tersebut menggambarkan bagaimana Generasi Z, frekuensi pilihan akses informasi politik masih tergolong tak intens. Ini jika membandingkannya dengan laporan State of Media yang menyebut orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 5,7 jam setiap hari dengan ponselnya yang terkoneksi internet. Durasi itu menjadi yang terlama disandingkan dengan negara lain di dunia. Artinya, belum tentu dalam 5,7 jam tersebut dalam sehari Generasi Z mengakses berita politik karena mereka, berdasarkan survei IDN Research tersebut hanya satu hingga tiga kali dalam sepekan.

Di era digitalisasi saat ini kerap ditemuka anak muda masih sangat lekat dengan rutinitas di luar perbincangan politik. Grid Games (2021) mengungkap, sekitar 71 persen total populasi milenial lebih menyukai gim video, dan 81 persen generasi Z adalah gamers.

Dalam waktu yang berbeda, terpaut sekitar satu tahun sesudahnya, Kompas melakukan jajak pendapat, tepatnya pada 18-20 Januari 2023. Meski sampelnya tidak spesifik Generasi Z, jajak pendapat tersebut menunjukkan antusiasme public dalam menatap pemilu 2024. Jajak pendapat itu menyajikan data sebanyak 84,7 persen pemilih akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.



Untuk di Kabupaten Jepara, angka ini sedikit di atas angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019, yakni 83 persen (melebihi target nasional yang kala itu dipatok 77,5 persen).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, diatur dalam regulasi kepemilihan. Pasal 28 Ayat 2 huruf b Peraturan KPU Nomor 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di antaranya adalah pemilih pemula dan pemilih muda.



## Kemenarikan Isu

Dalam berbagai kesempatan, KPU juga menjadikan segmen pemilih pemula dan pemilih muda ini sebagai sasaran kegiatan sosialisasi pemilu maupun pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Jepara misalnya, hampir setiap saat ke sekolah-sekolah untuk berdialog dengan para pelajar yang pada Pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilih pemula. Banyak hal yang mereka sampaikan. Sebagian telah mengetahui sebagian dari tahapan-tahapan penting pemilu, namun sebagian lagi belum mengetahui.

Hal-hal yang mereka ketahui di antaranya soal waktu coblosan pemilu 2024 dan apa yang akan dipilih dalam pemilu nanti. Mereka juga sebagian memiliki tanggapan-tanggapan yang analitik terkait Pemilu 2024 yang akan mereka ikuti nanti. Penulis melihat, sebagian dari mereka memiliki kedulian terhadap mutu pemilu.



Hoaks dan politik uang, dua isu yang sering (untuk tidak menyebut selalu) ada di tengah pemilu, menjadi yang paling sering mereka soroti. Mereka mengambil posisi bagaimana dua parastit demokrasi ini bisa dicegah atau diminimalisasi.

Bagi anak-anak muda, proses demokrasi elektoral, meti mengasyikkan dan menarik. Jika tidak, mereka berpotensi menjaga jarak. Mereka menggarisbawahi, hoaks dan politik uang adalah dua hal yang paling potensial mereduksi kedaulatan mereka sebagai pemilih. Kemenarikan isu yang menyertai pemilu, bisa menjadi salah satu kunci seberapa besar partisipasi generasi muda dalam proses memilih para pemimpin ini.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah anak muda harus dilibatkan/melibatkan diri dalam proses Pemilu 2024, sehingga mereka tidak merasa menjadi objek dan sumber suara semata. Jumlah mereka yang signifikan dalam daftar pemilih, mesti diikuti dengan keterlibatan diri yang aktif di semua tahapan.

Namun untuk bisa terlibat secara aktif, maka butuh kesadaran yang timbul dari benak generasi muda. Namun ini membutuhkan prasyarat, apakah ekosistem mereka mendukung untuk bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam kepemiluan. Bukankah kesadaran itu perlu didahului pengetahuan-pengetahuan yang cukup tentang pemilu secara procedural maupun substantif? Inilah perlunya dialektika yang terus menerus bagaimana anak-anak muda tidak absen dalam setiap narasi kepemiluan, terutama di ranah digital yang menjadi tempat mereka mengaktualisasikan diri.

Kedua, lembaga penyelenggra pemilu juga harus "stay relevant". Bagaimana pesan-pesan kepemiluan ini tepat sasaran ke semua segmen, termasuk ke Generasi Z yang punya pola komunikasi dan informasi khas karena mereka adalah digital native. Lembaga penyelenggra pemilu harus terus konsisten menjalin kemitraan dengan segmen ini dan memberikan ruang yang cukup untuk berdialog dan berbagi informasi kepemiluan dengan mereka.

Ketiga, peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, juga mesti melibatkan generasi muda dalam pendidikan politik. Jangan sampai hanya mengalkulasi pemilih pemula ini sebagai objek pundi suara, namun bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka dalam melanjutkan estafet kepemimpinan melalui cara-cara berpolitik yang benar-benar "muda", segar, menggairahkan, dan menarik.

Narasi Pemilu 2024 sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan mengambil kebijakan strategis selama lima tahun, sekaligus pemilu sarana integrasi bangsa harus menjadi percakapan sehari-hari anak muda. Dalam waktu yang tidak lama, mereka yang muda akan megang kendali perjalanan bangsa ini.

# Memotivasi Calon Wisudawan PPKAI Unisnu Jepara Hadirkan Dr. Hendi Pratama

Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Konseling (PPKAI) menggelar pelatihan soft skill pra wisuda di Auditorium perpustakaan lantai 3 Unisnu Jepara pada Selasa (6/7).

Pelatihan softskill ditujukan kepada calon wisudawan angkatan 20 Unisnu Jepara untuk menyiapkan mental dan skill lulusan sebelum menghadapi dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem hybrid yang dihadiri 100 peserta secara luring dan disiarkan melalui zoom serta live streaming youtube.

Rangkaian acara dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan pembacaan tahlil dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syubbanul Wathon, dan Mars Unisnu, sambutan – sambutan, penyampaian materi, dan penutup.

Kepala PPKAI, Dr.Wahidullah,S.H.I., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa urgensi kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi calon lulusan dalam mencari pekerjaan. Selain itu, beliau juga mengungkapkan harapannya agar setelah lulus tetap menjaga silaturahmi dengan dosen dan perguruan tinggi.

Untuk membekali kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, PPKAI menghadirkan kepala bagian dinas ketenagakerjaan Jepara, Eko Sulistyono, S. STP., M.H. Beliau menyampaikan materi mengenai realita persaingan tenaga kerja dan bagaimana membuat CV maupun lamaran kerja. Pesan menarik yang disampaikan beliau di akhir sesi adalah “Kita harus memiliki daya



jual yang lebih selain gelar”.

Melengkapi materi pertama, materi kedua disampaikan oleh Dr. Hendi Pratama yang merupakan dosen, motivator, dan coach transformasi pendidikan. Materi kedua ini membahas mengenai personal branding agar nantinya calon wisudawan dapat menemukan value untuk membranding diri mereka sendiri. Pesan menarik yang disampaikan beliau di akhir sesi adalah “Selama kita tahu value kita dan membranding diri maka tidak akan menjadi pengangguran.”

“Acaranya bagus, materi yang diberikan juga related dengan yang terjadi di kehidupan kita sebagai fresh graduate. Materi kedua yang disampaikan pak Hendi juga sangat memotivasi” pungkas Hapsari, calon wisudawati dari prodi manajemen.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama peserta. (Frhn/lensa)

# Hai Pemuda Jangan “TIDUR”, Ayo Awasi Pemilu



Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana bagi rakyat untuk memilih. Menyatakan pendapat melalui coblosan. Berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara, sehingga turut serta dalam menentukan arah dan pemimpin negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan negara ditentukan. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih dan dipilih.

Dalam pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memiliki dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam Undang-undang Pemilu tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; dan terbuka. Pemilu yang bersih dari money politic akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil.

Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali kaum muda, san-

gat penting dalam menjaga kebersihan dan kejujuran Pemilu. Kaum muda memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan Pemilu karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewarisi Indonesia di masa depan. Tak sepatutnya, pemuda itu “tidur”. Tidur tak peduli terhadap nasib bangsanya.

Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang diliris KPU pada 2 Juli 2023 adalah 2204.807.222. Dari jumlah itu 52 persen di antaranya pemilih muda (Tempo.co, 2 Juli 2023).

Rinciannya, pemilih usia 17 tahun 0,003 persen atau sekitar 6 ribu jiwa. Pemilih 17 tahun-30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa. Lalu disusul usia 31 tahun-40 tahun sebesar 20,7 peresen atau sekitar 42,395 juta jiwa.

SDM pemuda yang luar biasa besar itu sangat baik dalam pelibatan partisipasi pengawasan pemilu. Salah satu keunggulan pemuda juga idealism yang tinggi.

Untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari kecurangan, pengawasan partisipatif menjadi sangat

penting. Dalam konteks ini, kaum muda memiliki peran yang krusial dalam pengawasan pemilu. Partisipa-



si kaum muda dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan integritas pemilu.

Penulis mencoba untuk menawarkan cara pemuda ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ada enam peran yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan kecerdasan untuk kebaikan bangsa. Kaum muda memiliki kecerdasan dan energi yang dapat digunakan untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi yang dimiliki untuk memantau dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu.

Kedua, ikut serta mengawasi jalannya pemilu. Generasi muda dapat aktif mengawasi jalannya pemilu. Baik saat tahap kampanye, pemungutan suara, maupun penghitungan suara.

Mereka dapat menjadi saksi pemilu yang bertugas memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada kecurangan yang terjadi.

Ketiga, berperan aktif mengkampanyekan anti golput. Dengan Kaum muda berperan dalam mengkampanyekan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan mendorong teman-teman sebaya untuk tidak golput. Mereka dapat menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya hak suara dan dampak dari golput.

Keempat, mengedukasi pemilih muda. Kaum muda dapat berperan dalam mengedukasi pemilih muda lainnya tentang pentingnya pemilu. Dan bagaimana cara berpartisipasi secara aktif.

Mereka dapat mengadakan diskusi, seminar, atau workshop yang membahas tentang pemilu dan demokrasi.

Kelima, berpartisipasi dalam lembaga pengawas pemilu. Kaum muda dapat aktif terlibat dalam lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka dapat menjadi pengawas pemilu, anggota panitia pemilihan, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut.

Keenam, menggunakan teknologi digital. Kaum muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan pemilu. Mereka dapat menggunakan media sosial, aplikasi mo-

bile, atau platform online lainnya untuk melaporkan potensi pelanggaran pemilu, berbagi informasi, dan memobilisasi pemilih muda.

Dalam menjaga kebersihan dan kejujuran Pemilu, Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas Pemilu. Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Selain itu, Bawaslu juga memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengawasi jalannya Pemilu dengan baik dan benar.

Dalam menjaga kebersihan dan kejujuran Pemilu, seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif. Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kejujuran Pemilu. Dengan menjaga kebersihan dan kejujuran Pemilu, Indonesia akan memiliki pemimpin yang jujur dan adil, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Peran kaum muda dalam pengawasan partisipatif pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Dengan keterlibatan aktif kaum muda, pemilu dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mewakili suara seluruh rakyat. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada kaum muda dalam melaksanakan peran mereka dalam pengawasan partisipatif pemilu.



Penulis: Sujiantoko

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

# Menggali Kreativitas Tanpa Batas

## Peran Artificial Intelligence dalam Bidang Seni

Seni selalu menjadi cermin keanekaragaman budaya dan ekspresi manusia. Dari seni lukis, sastra, musik, hingga teater, kreativitas seniman telah mengilhami dan mengubah dunia kita. Namun, pada saat ini, kemajuan teknologi membawa perubahan baru ke dunia seni, yaitu Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI telah membuka pintu ke peluang baru untuk ekspresi seni dan menghadirkan tantangan serta pertanyaan etika. Artikel ini akan membahas bagaimana AI telah menyentuh dan mempengaruhi berbagai aspek seni, memberikan pandangan tentang bagaimana interaksi antara manusia dan mesin membentuk dunia kreativitas.

### 1. Seni Kreasi AI

Dalam seni kreasi, AI telah mampu menghasilkan karya seni baru yang menarik. Melalui algoritma pembelajaran mesin, AI dapat menghasilkan seni visual, musik, dan puisi. Contohnya, beberapa seniman menggunakan algoritma generatif untuk menciptakan karya seni unik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. AI tidak hanya menghasilkan karya seni baru, tetapi juga membantu seniman dalam eksplorasi ide dan teknik baru, membuka jalan bagi eksperimen yang lebih kreatif.

### 2. Seni Interaktif dan Pendidikan

AI juga telah digunakan dalam seni interaktif dan edukasi. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan instalasi seni atau karya seni interaktif yang merespons gerakan, emosi, atau bahkan data pengguna. Hal ini membawa pengalaman seni yang lebih mendalam dan mengajak pemirsa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kreatif. Dalam pendidikan seni, AI dapat menjadi alat yang berguna bagi pengajaran dan pembelajaran. Program AI dapat memberikan umpan balik secara instan kepada siswa tentang karya seni mereka dan membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka dengan cepat.



### 3. Restorasi Seni dan Konservasi

Dalam bidang restorasi seni, AI juga telah membantu dalam memulihkan karya seni yang rusak atau terhapus. Melalui analisis gambar dan data, AI dapat merekonstruksi bagian yang hilang atau merusak dari karya seni asli, memastikan warisan seni kita tetap hidup dan dipahami oleh generasi mendatang.

### 4. Tantangan Etika

Meskipun AI telah membawa banyak manfaat dalam bidang seni, ada juga tantangan etika yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah hak cipta dan kepemilikan karya seni yang dihasilkan oleh AI. Saat AI mampu menciptakan karya seni, siapa yang seharusnya memiliki hak cipta dan manfaat dari karya tersebut? Selain itu, ada pertanyaan tentang apakah AI dapat menggantikan peran seniman manusia sepenuhnya. Meskipun AI dapat menghasilkan karya seni yang menakjubkan, ada keunikan dalam pandangan, perasaan, dan pengalaman manusia yang sulit ditiru oleh mesin.



Kesimpulan dari saya adalah Artificial Intelligence telah membawa revolusi baru dalam dunia seni. Dari seni kreasi hingga seni interaktif, AI memberikan peluang tak terbatas untuk eksplorasi dan ekspresi seni. Namun, sebagai manusia, kita juga perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Seni tetap menjadi ekspresi jiwa, dan kehadiran AI haruslah melengkapi dan memperkaya proses kreatif, bukan menggantikannya. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita dapat mencapai keindahan dan kebermaknaan yang lebih dalam dalam seni dan kehidupan kita.

penulis : Lino

# SETENGAH HATI MEMBERI

## PENDIDIKAN POLITIK

Awal tahun ini saya mengisi salah satu pendidikan politik. Yang menginisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jepara kerja sama dengan salah satu pimpinan DPRD Jepara. Di antara pembicara itu juga ada dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara.

Pesertanya didominasi anak-anak muda. Yaitu antara usia 25-35 tahun. Ada perempuan dan laki-laki. Ketika giliran presentasi, beberapa pertanyaan tentang pemilu 24 saya utarakan ke peserta. Pertanyaan lebih pada pengetahuan dasar politik, undang-undang, dan tentang pemilu 2024. Mulai kapan dilaksanakan, pemilihan apa saja di pemilu 24, juga sudah menentukan siapa yang dipilih atau belum.

Beberapa pertanyaan ada yang dijawab peserta. Tapi lebih banyak yang terjawab. Jarak seminar itu dengan pemilu 2024 itu sekitar 10 bulan. Tapi para pemuda tak paham pemilu bahkan siapa yang akan dipilih untuk es-tafet kepemimpinan di daerah hingga pusat.

### DATA

Riset kecil-kecilan yang dilaksanakan teman-teman Lembaga Pres Mahasiswa (LPM) Lensa Media Fak. Saintek Unisnu Jepara pun menunjukkan hal sama. Tidak banyak pemuda yang paham tentang pemilu 2024. Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang dirilis KPU pada 2 Juli 2023 adalah 2204.807.222. Dari jumlah itu 52 persen di antaranya pemilih muda (Tempo.co, 2 Juli 2023).

Rinciannya, pemilih usia 17 tahun 0,003 persen atau sekitar 6 ribu jiwa. Pemilih 17 tahun-30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa. Lalu disusul usia 31 tahun-40 tahun sebesar 20,7 persen atau sekitar 42,395 juta jiwa.

Pemimpin yang cerdas, baik (amanah), dan keren, itu diciptakan dari pemilih sama, cerdas, baik (amanah), dan keren.

Maka para pemuda itu sudah sepertutnya diciptakan sosok yang cerdas, amanah, dan keren. Cerdas artinya pandai manajemen, pandai memimpin, dan bijak memimpin. Amanah itu artinya, penuh tanggung jawab terhadap urusan yang diberikan kepadanya. Dan bijak, menyikapi suatu hal itu bijak. Tidak gegabah. Bagaimana menciptakan pemuda yang demikian.

Saya diskusi dengan salah satu pegawai Bakesbangpol yang hadir di situ. Jika kurikulum pendidikan politik disampaikan pada salah satu mata pelajaran anak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Tidak sekedar dimasukkan di salah satu bab di PPkN atau pendidikan pancasila kewarganegaraan.

### KENAPA PENDIDIKAN POLITIK ITU PENTING

Usia baligh seseorang kira-kira usia 17. Jika usia masuk SD tujuh tahun. Maka SMA kelas X atau kelas 1 siswa SMA sudah usia 16 tahun. Usia 17 tahun duduk di kelas XI. Diusia itu, siswa belum punya modal pengetahuan pendidikan politik. Tetapi di usia itu, siswa punya hak pilih.

*"Bagaimana bisa memilih pemimpin yang baik. Kalau kemudian mereka (anak muda, Red) saja tak tahu siapa yang ia pilih. Tak tahu tujuan memilih, dan sebagainya," (Zainal Abidin )*



Pertanyaannya, bagaimana bisa usia 17 tahun atau 18 tahun disuruh nyoblos. Jika pendidikan politik di usianya tak pernah disampaikan. Yang terjadi adalah, mereka menganut atau minta arahan orang tuanya.

Di usia itu siswa itu baligh, tapi tidak baligh secara pengetahuan politik. Tidak memadainya pendidikan politik itu terbukti ketika saya mengisi seminar latihan dasar kepemimpinan. Saat itu saya bertanya wakil rakyat di Negara ini di mana? Lalu dipilih siapa? Yang bisa jawab hanya beberapa. Sisanya tidak paham. Padahal mereka siswa pilihan dari sebuah kota.

Tidak memadainya pengetahuan politik itu juga berakibat pada hasil pemilu. Yaitu nilai pragmatis. Mereka yang bisa ikut kontestasi pemilu adalah yang punya uang.

#### FENOMENA POLITIK UANG MASIH SERING TERJADI

Pengalaman jadi wartawan, pemilu petinggi atau desa, satu pemilih rata-rata diharagai antara Rp 100.000 sampai Rp 200.000. Fenomena banyaknya artis yang ikut pemilu menunjukkan hal sama. Walaupun mereka mendongkrak di sisi popularitas, tetapi juga keuangan artis.

Fenomena itu juga bisa dikaitkan, jika kontestan pemilu adalah mereka yang punya uang. Yang rata-rata mereka pebisnis. Itu dimaklumi, karena masyarakat kita juga didominasi karakter pragmatis.

#### PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI PENANGKAL KARAKTER PRAGMATIS

Cara menangkal karakter pragmatis salah satunya pendidikan politik itu. Pendidikan politik yang diadakan Kesbangpol dan anggota dewan hanya sebatas seminar. Pertemuan tak lebih dari dua jam. Itupun dengan banyak materi. Pendidikan politik sudah sepertutnya dijadikan sebuah kurikulum. Di dalam kurikulum itu, siswa diberi materi tentang pengetahuan dan amanah undang-undang terkait penyampaian hak dan pemilu. Materi tentang penyelenggara pemilu, pengawasan pemilu, apa itu DPR lalu tugasnya, juga sebagai pemilih. (\*)

## WAJIB BAGI PEMIMPIN MUDA POLITIK BEKERJA DENGAN KESADARAN PUBLIK

- NAJWA SHIHAB



# FENOMENA POLITISI

## MENDADAK AGAMIS JELANG PEMILU

### PERSPEKTIF SANTRI

Penulis : Hanif Maulana

Pemilihan umum selalu menjadi periode penting dalam kehidupan politik sebuah negara. Di berbagai belahan dunia, politisi berlomba-lomba mendapatkan dukungan rakyat dengan berbagai strategi. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah politisi yang tiba-tiba menunjukkan kecenderungan agamis yang lebih kuat menjelang pemilu. Fenomena ini juga memantik perhatian santri, yang memiliki wawasan mendalam tentang agama dan politik.

Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam tradisional di Indonesia dan beberapa negara lain. Seiring waktu, pesantren telah menjadi institusi penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pilar budaya dan spiritualitas. Banyak politisi mengakui pengaruh pesantren dan berusaha mendekatinya, terutama saat menjelang pemilu. Munculnya politisi yang tiba-tiba agamis sering kali menjadi pertanda bagi pesantren, yang berpotensi mendapatkan dukungan dari mereka.

Santri, atau para pelajar di pesantren, memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajaran Islam. Mereka sering kali memiliki kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang tulus dalam beragama dan tindakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan politik. Fenomena politisi mendadak agamis menjelang pemilu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, ada santri yang menerima perubahan sikap politisi ini sebagai bentuk dukungan terhadap agama dan menganggapnya sebagai sesuatu yang positif. Kedua, ada juga santri yang skeptis dan ingin melihat bukti konkret dari komitmen politisi terhadap agama.

#### POLITIK BERAGAMA

Agama memiliki peran yang penting dalam membimbing kehidupan masyarakat. Politisi yang mendekati pesantren dan menunjukkan komitmen terhadap agama sering kali dianggap sebagai calon yang memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang kuat. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat risiko dalam mencampuradukkan agama dengan politik. Santri cenderung melihat pentingnya mempertahankan kedaulatan agama dan memastikan bahwa penggunaan agama dalam politik tidak hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

Dalam hal ini konsistensi adalah faktor penting dalam menilai kecenderungan agamis politisi menjelang pemilu. Apakah tindakan ini hanya sebatas strategi sementara ataukah mencerminkan nilai-nilai yang konsisten dengan ajaran agama? Pertanyaan ini menjadi kunci dalam menilai integritas dan kejuran politisi. Pesantren juga berperan dalam menghasilkan generasi muda yang sadar politik dan beretika, mampu berpikir kritis dalam menilai calon pemimpin.

#### MENDADAK AGAMIS MENJELANG PEMILU

Fenomena politisi mendadak agamis menjelang pemilu mencerminkan dinamika kompleks antara agama dan politik. Dalam perspektif santri, kecenderungan agamis politisi memerlukan penilaian yang cermat terhadap motivasi, konsistensi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penting bagi politisi untuk menghormati dan memahami nilai-nilai agama secara tulus, tanpa memanfaatkannya sebagai alat politik semata.\*



# PEMILU dan KADER PMII UNTUK 2024

Tahun 2024 akan menjadi kesempatan para Kader PMII dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Hal ini karena mereka yang masuk generasi Z akan bertindak sebagai pemilih mayoritas.

Momentum ini harus dimanfaatkan para kader PMII untuk berkiprah melalui peran aktifnya di lapangan. Kader PMII harus ambil bagian dalam mensukseskan hajat demokrasi yang sehat alih-alih berpangku tangan karena merasa suara pemuda sebagai suara mayoritas.

## PELUANG

di era bonus demografi ini Gen Z harus betul betul memahami dengan seksama soal peluang untuk ambil peran, peran dalam kiprah penyelenggara pemilu atau bahkan memanfaatkan kekosongan Bacaleg DPRD, DPD, DAN DPR RI disetiap partai yang belum terpenui. Kader PMII harus mulai menampakkan jati dirinya sesuai dengan passion dan kapasitasnya, karena momentum 2024 ini menjadi tahunnya para pemuda Gen Z, sebagai bentuk proses pendewasaan berdemokrasi. Dengan begitu segala bentuk perbedaan opini yang disebabkan oleh adanya

perbedaan dukungan yang ditemukan di lapangan menjadi suatu hal yang biasa, melalui peran edukatif terhadap masyarakat.

Kader muda PMII juga mempunyai kesempatan mendirikan semacam lembaga demokrasi independen atau pemantau Pemilu. Pendirian lembaga tersebut dimaksudkan agar ada di antara kader yang berposisi sebagai pihak yang berada di luar lingkaran dukung-mendukung antarcalon.

Dengan begitu, terdapat kader yang bisa mengambil jarak untuk melihat dinamika dan realitas politik secara jernih. Mereka juga akan melihat dinamika yang terjadi selama pemilu dari berbagai sudut pandang. Semua peran tersebut diharapkan dapat membentuk sisi idealisme sebagai ekspresi yang identik dan melekat dalam jiwa generasi muda, di tengah tantangan dan dinamika di tahun politik. Terlebih fakta sebagai pemilih mayoritas yang disemat oleh kelompok milenial dan generasi Z juga membuat kedua kalangan ini akan dilirik banyak partai.

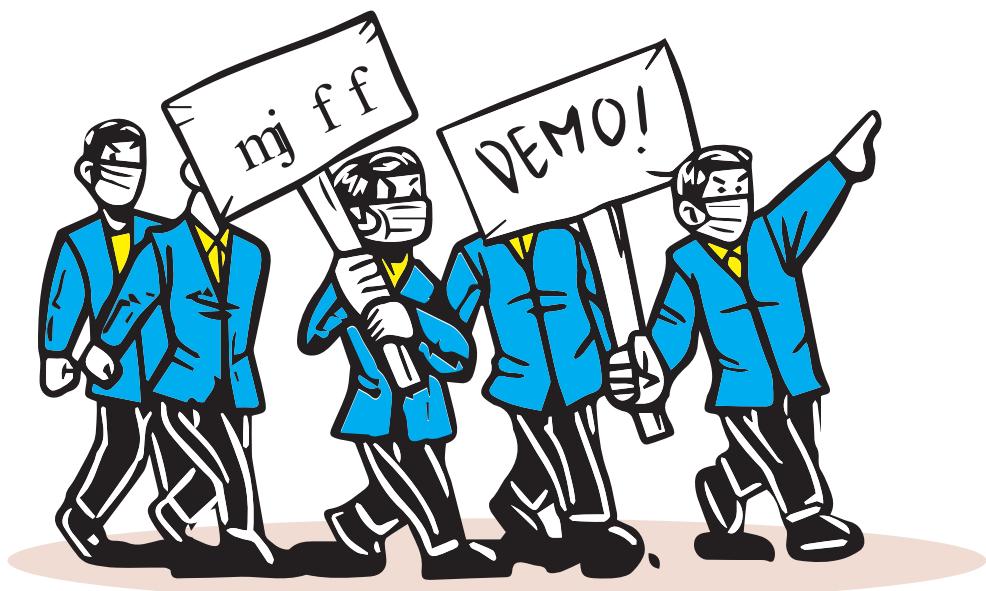
## Seimbang

kader PMII juga harus mempunyai sifat tawassuth yakni tengah tengah, Artinya dari semua kader

PMII Gen z tidak semua mempunyai minat untuk ambil peran partisipatif baik didalam penyelenggara pemilu atau menjadi Bacaleg untuk maju ke legislatif. kader PMII yg belum mempunyai peran dalam penyelenggara harus bisa mengkaunter isu-isu yg menyudutkan salah satu pihak, baik itu dari antar calon atau berita soal problem yg ada didalam penyelenggara yg tidak tertangani contohnya "serangan Magrib tim ses dari salah satu calon, ini menjadi salah satu budaya dan realitas publik yang bahkan hari ini seperti dimaklumi oleh para khalayak umum untuk mengais rejeki tanpa berkeringat".

Nah, dari beberapa hal terjadi kader PMII harus tetap hadir ditengah tengah untuk menjadi pengurai masalah, sehingga konflik yg terjadi baik konflik pemuda dengan orang tua atau sesama pemuda harus ada kader PMII yang menjadi penyeimbang atau penengah, serta kader PMII tetap harus mensukseskan khajat besar bangsa ini untuk kemajuan serta komitmen berbangsa Dan bernegara. PMIIKU... PMIIMU ... PMII KITA SEMUA.

SALAM PERGERAKAN.



**Suara Angin**  
**Karya: Maira Niwasa**

Maka, pada saat manah menjadi mangu serempak paham khalikah saban insan Tak usah kata menjadi bait, Seperlunya saja jika ingin mengungkit.

Namun, kala berubah menjadi hembusan angin laut, yang malamnya bising-bising kapal nelayan, menyebrang samudra sejauh harapan. Demi sesuap nasi esok mendatang.

Layaknya hidup adalah perniagaan.

Hingga terucap syukur melihat luasnya buana. Banyak insan ingin menjatuhkan. Tutur kata menyakitkan. Sebab, ego mana yang akan meredam tanpa adanya perenungan.

Tanpa menggerutu, pahami dengan jiwa yang bersahaja. Berterimakasihlah pada diri nan kokoh. Kemerdekaan hidup butuh pengorbanan. Namun kuasa-Nya lah yang menjadi keputusan.

Jepara, 12 Agustus 2023

**Masamu Bukan Aku**  
**Karya: Milfa Latifa**

Pemuda, kini saatnya Gerak aksi bukan sebatas kata Gentas persuasi privat Jika tak ingin terus terjerat

Aturan bilik dibuat ketat Kertas aspirasi bukan lagi suara hati Melainkan tajuk sampul surat Persaingan berakhir suap tanpa henti

Ungkap yang sejatinya palsu Demokrasi dalam genggammu Alih-alih acuh tuk kebenaran Terlebih ikut pesta foya merayakan

Apalah jadinya taruh kata terlena Penyesalan terjadi diakhir cerita

Duduk santai katakan enggan Peranmu tegak mari lakukan

Demaan, 10 Agustus 2023

**Dongeng Suaka**  
**Karya: Ratih Ayu Puspitasari**

Sampaikan salam pada reruntuhan hasrat yang makin melarat; ditelan umpat.

Dan mereka terbaring dalam tawa semu sebab kurus doa tetaplah abai.

Aku berlari, mengejar kudus yang terlepas dan nyaris dihempas nyanyian naif.

Surakarta, 2023



# Game Kesuksesan

Sukses bukanlah suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap tergantung tujuan yang Anda inginkan. Maka apa yang bisa membuat hidup anda 100% sukses dunia dan akhirat?...

J	A=1	H=8	O=15	V=22
I	B=2	I=9	P=16	W=23
K	C=3	J=10	Q=17	X=24
A	D=4	K=11	R=18	Y=25
	E=5	L=12	S=19	Z=26
	F=6	M=13	T=20	
	G=7	N=14	U=21	



Apakah KAYA?  
Apakah AMAL JARIYAH?



KAYA = 11+1+25+1

38



AMAL JARIYAH = 1+13+1+12+10+1+18+9+25+1+8

99

Masih Kurang 1 angka  
lalu apakah itu?...

Jawablah Disini!

